

LAPORAN PENGADUAN

DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR



DAFTAR ISI

| DAFTAR IS | l | ii |
|-----------|--|-----|
| DAFTAR TA | BEL | iii |
| DAFTAR GI | RAFIK | iv |
| DAFTAR G | AMBAR | V |
| BAB 1 | PENDAHULUAN | 6 |
| 1.1 | Latar Belakang | 6 |
| 1.2 | Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.3 | Peraturan Perundang-undangan | 7 |
| BAB II | GAMBARAN UMUM | 8 |
| 2.1 | Pengaduan Masyarakat | 10 |
| 2.2 | Permohonan Informasi | 12 |
| BAB III | PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT | 13 |
| 3.1 | Pengaduan Melalui Aplikasi Sibadra | 14 |
| 3.2 | Pengaduan Melalui Aplikasi SPAN Lapor | 15 |
| 3.3 | Pengaduan Melalui Website Resmi Dinas Kesehatan | 16 |
| 3.4 | Pengaduan Melalui Media Sosial Instagram | 17 |
| 3.5 | Pengaduan Melalui Microblog Twitter | 18 |
| 3.6 | Pengaduan Melalui Email Dinkes Kota Bogor | 19 |
| 3.7 | Jumlah Hari Penanganan Pengaduan | 20 |
| BAB IV | PERMOHONAN INFORMASI | 21 |
| 4.1 | Permohonan Informasi Melalui Website Resmi | 21 |
| 4.2 | Permohonan Informasi Melalui Email Resmi | 22 |
| 4.3 | Permohonan Informasi Melalui Media Sosial Instagram | 22 |
| 4.4 | Permohonan Informasi Melalui Microblog Twitter | 23 |
| 4.5 | Jenis Media yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor | 25 |
| BAB V | PENUTUP | 26 |

DAFTAR TABEL

| Tabel 2.1 Jumlah Saran Prasarana Pelayanan Publik | 8 |
|---|----|
| Tabel 3.1 Klasifikasi Topik Pengaduan Dinas Kesehatan Kota Bogor Januari s.d Juni | |
| 2024 | 13 |
| Tabel 4.1 Informasi Kanal Media Sosial Dinas Kesehatan 2024 | 25 |

DAFTAR GRAFIK

| Grafik 2.1 Perbandingan Total Pengaduan Media Sosial Dinas Kesehatan Kota Bogor Januari s.d Juni 2024 |
|---|
| Grafik 2.2 Total Permohonan Inforamsi Melalui Media Sosial Dinas Kesehatan Kota Bogor Januari s.d Juni 2024 |
| Grafik 3.1 Jumlah Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Sibadra Periode Januari- Juni 2024 |
| Grafik 3.2 Status Laporan Penyelesaian Pengaduan Melalui Aplikasi Sibadra Periode Januari- Juni 2024 |
| Grafik 3.3 Jumlah Pengaduan Melalui Aplikasi SPAN LAPOR Periode Januari- Juni 2024 |
| Grafik 3.4 Jumlah Pengaduan Website Dinas Kesehatan Periode Januari- Juni 2024.17 |
| Grafik 3.5 Jumlah Pengaduan Melalui Instagram Dinas Kesehatan Periode Januari- Juni 2024 |
| Grafik 3.6 Jumlah Pengaduan Melalui Twitter Dinas Kesehatan Periode Januari- Juni 2024 |
| Grafik 3.7 Rata-rata Hari Penanganan Pengaduan Kanal Media Sosial Dinas Kesehatan Periode Januari- Juni 2024 |
| Grafik 3.8 Rata-rata Hari Penanganan Pengaduan Kanal Media Sosial Dinas Kesehatan Periode Januari- Juni 2024 |
| Grafik 4.1 Permohonan Informasi Media Sosial Dinas Kesehatan Periode Januari- Juni 2024 |
| Grafik 4.2 Permohonan Informasi Media Website Dinas Kesehatan Periode Januari- Juni |
| 2024 |
| Grafik 4.3 Permohonan Informasi Media Email Dinas Kesehatan Periode Januari- Juni 2024 |
| Grafik 4.4 Permohonan Informasi Media Instagram Dinas Kesehatan Periode Januari- Juni 2024 |
| Grafik 4.5 Permohonan Informasi Media Twitter Dinas Kesehatan Periode Januari- Juni 2024 |
| 23 |
| Grafik 4.6 Permohonan Informasi Media Sosial Dinas Kesehatan Berdasarkan Klasifikasi |
| Topik Periode Januari- Juni 202424 |
| Grafik 4.7 Permohonan Informasi Media Sosial Dinas Kesehatan Berdasarkan Kanal Media Periode Januari- Juni 2024 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar 2.1 Ruang Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kota Bogor | 8 |
|--|----|
| Gambar 2.2 Website Dinas Kesehatan Kota Bogor | 9 |
| Gambar 2.3 Instagram Dinas Kesehatan Kota Bogor | 10 |
| Gambar 2.4 Twitter Dinas Kesehatan Kota Bogor | 11 |

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi merupakan hak dasar bagi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya agar dapat tercapai aktualisasi diri dan pengembangan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik. Transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dapat menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta mengembangkan sistem pemerintahan yang demokratis dan partitipatif.

Guna menjamin hak masyarakat tersebut Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelengaraan negara. Dalam perkembangannya, Pemerintah Daerah Kota Bogor mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Pemerintah Daerah Kota Bogor juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tatacara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Peraturan Walikota tersebut mengatur standar layanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Guna mendukung kelancaran pelayanan informasi publik, telah pula diterbitkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-203 Tahun 2014 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Dalam mendukung hal tersebut, kegiatan layanan informasi publik dilakukan oleh Bagian Humas Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Bogor, dalam pelayanan informasi publik adalah pengelolaan media komunikasi berbasis internet dengan akun Dinas Kesehatan Kota Bogor yang meliputi microblog twitter, media sharing instagram dan youtube. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Mengatasi suatu kendala pada pelayanan informasi publik,

- 2. Mengambil suatu keputusan yang lebih efektif pada setiap kegiatan di bidang IKP;
- 3. Mengetahui kemajuan dan perkembangan pada Bidang IKP.
- 4. Mengadakan monitoring dan evaluasi.
- 5. Menemukan inovasi baru pada pelaksanaan pelayanan informasi

1.3. Peraturan Perundang-Undangan

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengaduan Publik
- 3. Peraturan Menteri Pan RB No 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
- 4. Peraturan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 5. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 6. Surat Keputusan Wali Kota Bogor No. 487.45-122 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Surat Keputusan Wali Kota Bogor No. 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor

BAB 2. Gambaran Umum

Dinas Kesehatan sebagai badan publik dimana penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan oleh PPID, dalama hal ini sekretariat Dinas Kesehatan. Sarana prasarana pelayanan publik yang ada di Dinas Kesehatan sebagai berikut :

| No | Sarana Prasarana | Kondisi | Jumlah |
|----|-------------------------|---------|---------|
| 1 | Ruang Pelayanan | Baik | 2 Ruang |
| 2 | Komputer PC dan Print | Baik | 1 Unit |
| 3 | Papan Informasi | Baik | 10 unit |
| 4 | Kotak Saran | Baik | 1 unit |
| 5 | Kursi Tunggu | Baik | 11 unit |
| 6 | Kamera | Baik | 1 unit |
| 7 | Lemari Koran/ Majalah | Baik | 2 unit |
| 8 | Website Dinas Kesehatan | Baik | 1 |
| 9 | Media Sosial Instagram | Baik | 1 |
| 10 | MicroblogTwitter | Baik | 1 |

Tabel 2.1 Jumlah Saran Prasarana Pelayanan Publik



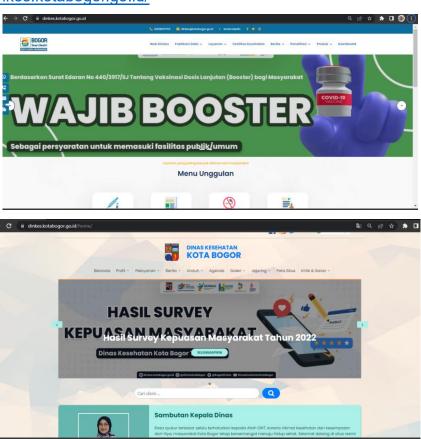


Gambar 2.1 Ruang Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kota Bogor

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik dan dalam penyampaian pengaduan secara cepat, efisien dan efektif. Dinas Kesehatan Kota Bogor memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui media elektronik dan non-elektronik, melalui pengembangan website dan media sosial, sehingga memudahkan masyarakat mengetahui informasi dan dapat meyampaikan pengaduan yang berada pada penguasaan PPID Dinkes Kota Bogor dan dapat mengaksesnya setiap saat.

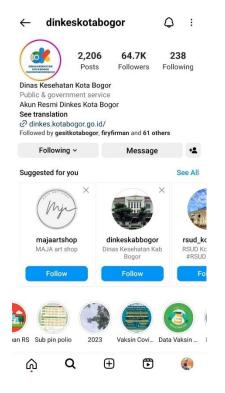
Apabila masyarakat publik tidak memperoleh informasi publik dapat mengajukan permohonan publik melalui dua cara yaitu pertama, mengajukan secara langsung dengan datang langsung ke kantor Dinas Kesehatan Kota Bogor, dan Kedua dapat melalui website,email (dinkes@kotabogor.go.id) dan media sosial resmi. Berikut pemanfaat teknologi informasi dalam memberikan infomarsi kepada masyarakat, sebagai berikut:

 Website Dinas Kesehatan Kota Bogor https://dinkes.kotabogor.go.id/



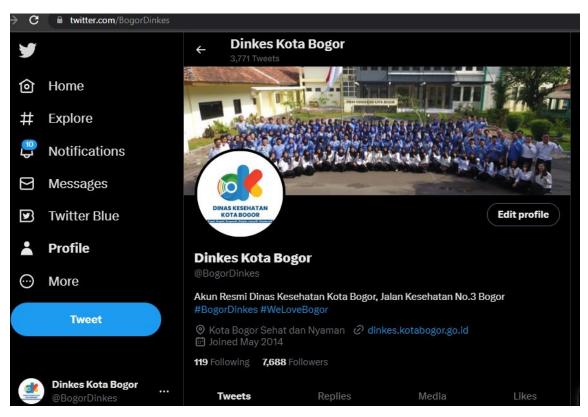
Gambar 2.2 Website Dinas Kesehatan Kota Bogor

Instagram Dinas Kesehatan Kota Bogor
 @dinkeskotabogor



Gambar 2.3 Instagram Dinas Kesehatan Kota Bogor

 Twitter Dinas Kesehatan Kota Bogor https://twitter.com/BogorDinkes



Gambar 2.4 Twitter Dinas Kesehatan Kota Bogor

2.1 Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi atau pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat, baik perseorangan, Lembaga atau masyarakat umum yang berisi keluhan atau ketidakpuasan terkait perilaku ,pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota

Bogor, baik yang dilakukan pegawai, informasi tentang pelanggaran kode etik, disiplin pegawai, dan keluhan kepada atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Pengaduan akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur 5W + 1H, yaitu :

- What : Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui
- Where: Di mana perbuatan tersebut dilakukan
- When : Kapan perbuatan tersebut dilakukan
- Who : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut
- How: Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb).

Adapun Bentuk Pengaduan Masyarakat merupakan penyampaian aduan atau informasi dari masyarakat atas terjadinya dugaan pelanggaran kode etik , pelayanan ataupun disiplin pegawai dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu:

1. Pengaduan secara langsung

Pengaduan secara langsung dilakukan oleh masyarakat dengan cara datang Langsung ke meja pengaduan (helpdesk) dan/atau bertemu langsung dengan pejabat yang berwenang dalam menangani pengaduan masyarakat. Pengaduan secara langsung dilakukan dengan menyampaikan secara lisan keluhan atau ketidakpuasan dan/atauinformasi adanya dugaan pelanggaran kode etik/disiplin pegawai, keluhan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban oleh pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan.

2. Pengaduan secara tidak langsung

Pengaduan secara tidak langsung dilakukan oleh masyarakat dengan cara tidak langsung berhadapan atau bertemu dengan pejabat yang berwenang dalam menangani pengaduan masyarakat atau datang langsung ke meja pengaduan/saluran. Pengaduan secara tidak langsung biasanya dilakukan melalui: Website resmi, email, aplikasi pengaduan Sibadra, Aplikasi SPAN Lapor, melalui fitur pesan media sosial Instagram, dan twitter.

Dalam pelaksanaan pelayanan pengaduan, Dinas Kesehatan memberikan ruang terbuka untuk masyarakat agar dapat menyampaikan kritik dan saran mengenai pelayanan Kesehatan di Kota Bogor. Dinas Kesehatan memiliki kanal pengaduan salah satunya melalui aplikasi SIBADRA yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor, kanal aduan lainnya yaitu kanal SP4N LAPOR, website resmi dan media sosial Dinas Kesehatan Kota Bogor. Pada periode bulan januari sampai dengan juni tahun 2024 total pengaduan yang telah diterima dan ditindaklanjuti dari seluruh kanal media tercatat 30 pengaduan.



Grafik 2.1 Perbandingan Total Pengaduan Media Sosial Dinas Kesehatan Kota Bogor Januari s.d Juni 2024

2.2. Permohonan Informasi

Untuk pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi. Pada periode Januari sampai dengan juni 2024, tercatat 561 permohonan informasi yang masuk ke Dinas Kesehatan melalui kanal yang tersedia.



Grafik 2.2 Total Permohonan Inforamsi Melalui Media Sosial Dinas Kesehatan Kota Bogor Januari s.d Juni 2024

Penyampaian informasi dikelola secara kontinyu oleh tim humas sekretariat Dinas Kesehatan dengan memproduksi berita kegiatan Kepala Dinas dan kegiatan bidang Kesehatan seperti bidang pencegahan penyakit menular,pelayanan Kesehatan rujukan dan lainnya. Berita yang telah diproduksi dan berbagai informasi lain disampaikan melalui website dan media sosial dinas Kesehatan kota Bogor .

BAB 3 Pelayanan Pengaduan Masyarakat

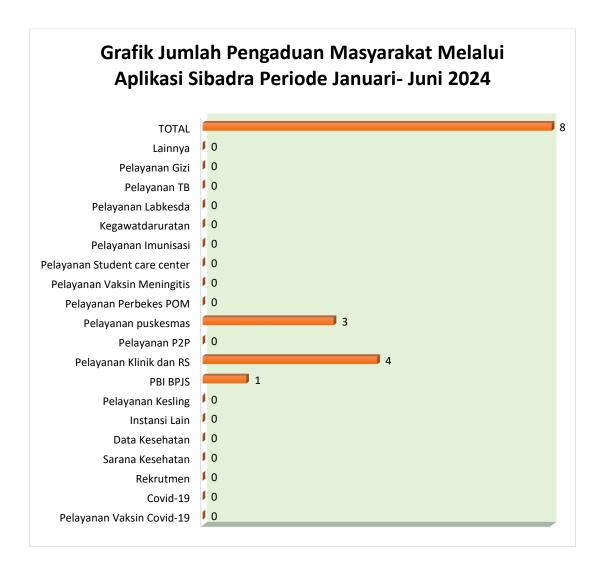
Layanan pengaduan melalui media sosial resmi dikelola oleh tim humas sekretariat Dinas Kesehatan, khususnya pengumpulan data melalui media online yang dibuat secara resmi atas nama Dinas Kesehatan Kota Bogor. Masyarakat Kota Bogor dapat menyampaikan pengaduan atau keluhan melalui media online resmi terdiri dari website resmi, email, aplikasi sibadra, SPAN Lapor, Instagram dan Twitter. Dalam pengumpulan data pengaduan terdapat pengelompokan klasifikasi topik pengaduan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

| No | Klasifikasi Topik | Keterangan |
|----|---------------------------|--|
| | Pengaduan | |
| 1 | Pelayanan Vaksin Covid-19 | Berisi tentang pengaduan jadwal pelaksanaan vaksin, lokasi, |
| | | pelayanan sertifikat vaksin dan pelayanan vaksin |
| 2 | Covid-19 | Berisi Pengaduan Kasus Covid-19 |
| 3 | Rekrutmen | Berisi tentang pengaduan penerimaan kerja |
| 4 | Sarana Kesehatan | Berisi tentang pengaduan sarana Kesehatan di Kota Bogor |
| 5 | Data Kesehatan | Berisi tentang pengaduan data kesehatan |
| 6 | Instansi Lain | Berisi tentang pengaduan yang dimiliki intansi lain sehingga |
| | | bukan bagian dari Dinkes dan dialihkan ke instansi tersebut |
| 7 | Pelayanan Kesling | Pelayanan Pengaduan mengenai Laik Hygiene, Kesehatan |
| | | Lingkungan |
| 8 | PBI BPJS | Pelayanan pengaduan mengenai layanan pengurusan PBI |
| | | BPJS |
| 9 | Pelayanan Klinik dan RS | Pelayanan pengaduan mengenai layanan RS dan Klinik di Kota |
| | | Bogor |
| 10 | Pelayanan P2P | Pelayanan pengaduan mengenai layanan penyakit menular |
| | | atau tidak menular |
| 11 | Pelayanan Puskesmas | Pelayanan pengaduan mengenai layanan Puskesmas |
| 13 | Pelayanan Perbekes POM | Pelayanan pengaduan mengenai layanan Obat dan PIRT |
| 14 | Pelayanan Vaksin | Pelayanan pengaduan Vaksinasi Meningitis |
| | Meningitis | |
| 15 | Pelayanan Student care | Pelayanan pengaduan mengenai penelitian/ magang |
| | center | |
| 16 | Pelayanan Imunisasi | Pelayanan pengaduan imunisaso |
| 17 | Kegawatdaruratan | Pelayanan pengaduan mengenai kegawatdaruratan |
| 18 | Pelayanan Labkesda | Pelayanan pengaduan mengenai Labkesda |
| 18 | Pelayanan Gizi | Pelayanan pengaduan mengenai gizi buruk |
| 19 | Pelayanan TB | Pelayanan Pengaduan mengenai layanan Tuberkulosis |
| 20 | Lainnya | Pelayanan pengaduan diluar klasifikasi yang ada |

Tabel 3.1 Klasifikasi Topik Pengaduan Dinas Kesehatan Kota Bogor Januari s.d Juni 2024

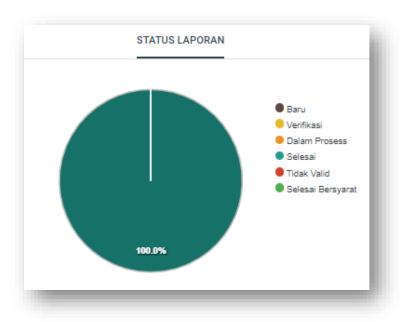
3.1. Pengaduan Melalui Aplikasi Sibadra

Pada grafik dibawah ini terlihat jumlah topik aduan tertinggi adalah mengenai pelayanan rumah sakit dan klinik di Kota Bogor, kedua mengenai pelayanan Puskesmas, dan ketiga mengenai pelayanan PBI BPJS. Total Jumlah sebanyak 8 aduan pada periode Januari sampai dengan juli 2024.



Grafik 3.1 Jumlah Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Sibadra Periode Januari- Juni 2024

Pengaduan yang sering diadukan terhadap pelayanan rumah sakit dan klinik adalah mengenai pelayanan tenaga Kesehatan, antrian dan prosedur klinik maupun rumah sakit selain itu Pengaduan Pelayanan Puskesmas banyak mengenai pelayanan tenaga Kesehatan, fasilitas dan prosedur pelayanan di Puskesmas



Grafik 3.2 Status Laporan Penyelesaian Pengaduan Melalui Aplikasi Sibadra Periode Januari- Juni 2024

Total pengaduan periode Januari sampai dengan Juli 2024 sebanyak 8 kasus, semua pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dapat dilihat pada grafik diatas.

3.2 Pengaduan Melalui Aplikasi SPAN Lapor

Pada grafik dibawah terlihat jumlah topik aduan tertinggi pertama adalah mengenai pelayanan rumah sakit dan klinik di Kota Bogor dan kedua pelayanan Puskesmas, dengan total aduan pada periode Januari sampai dengan Juni 2024 sebanya 3 (Tiga) aduan.

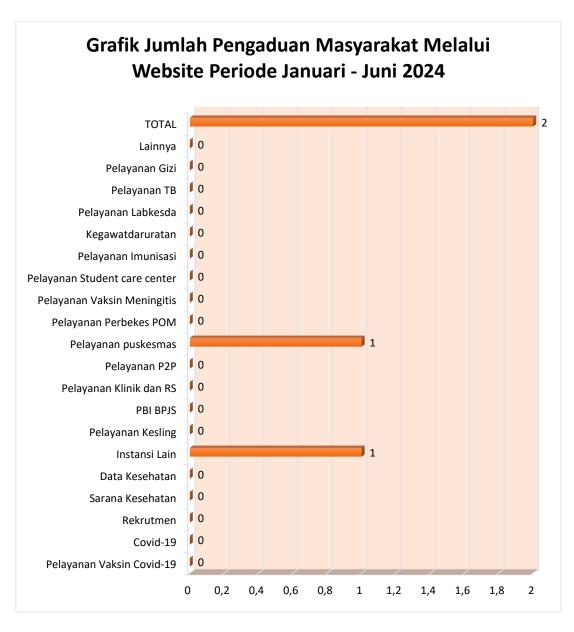


Grafik 3.3 Jumlah Pengaduan Melalui Aplikasi SPAN LAPOR Periode Januari- Juni 2024

3.3 Pengaduan Melalui Website Resmi Dinas Kesehatan

Pada grafik dibawah ini terlihat total jumlah aduan melalui kanal website sebanyak 2(dua) aduan pada periode Januari sampai dengan juni 2024, yaitu aduan mengenai pelayanan puskesmas dan aduan terhadap instansi lain.

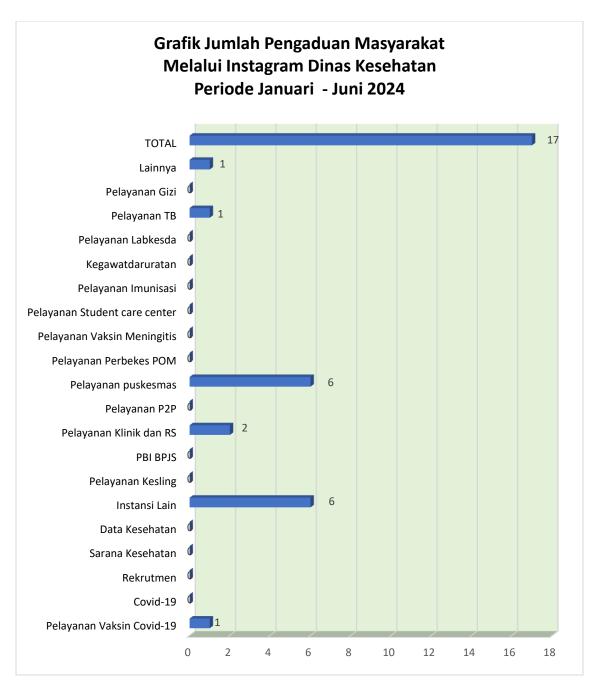
Setiap pengaduan yang masuk melalui media sosial website , pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.



Grafik 3.4 Jumlah Pengaduan Website Dinas Kesehatan Periode Januari- Juni 2024

3.4 Pengaduan Melalui Media Sosial Instagram

Total pengaduan melalui media sosial instagram sebanyak 17 pengaduan, pada grafik dibawah ini menunjukan jumlah pengaduan tertinggi yaitu mengenai topik pelayanan puskesmas dan instansi lain sebanyak 6 pengaduan, mengenai pelayanan rumah sakit dan klinik sebanyak 2 pengaduan, aduan untuk pelayanan vaksin covid sebanyak 1 aduan dan pengaduan lainnya di luar kategori sebanyak 1 pengaduan.

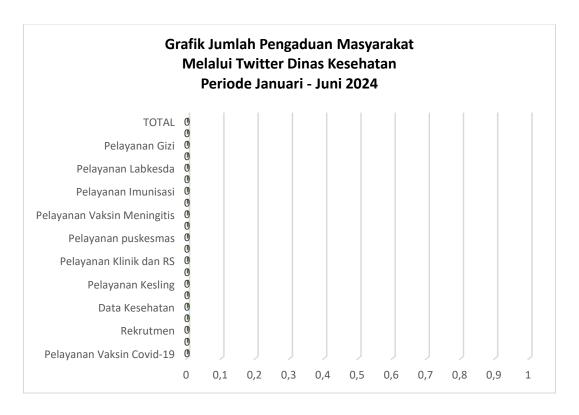


Grafik 3.5 Jumlah Pengaduan Melalui Instagram Dinas Kesehatan Periode Januari- Juni 2024

Setiap pengaduan yang masuk melalui media sosial instagram , pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

3.5 Pengaduan Melalui Microblog Twitter

Pada grafik dibawah ini dapat terlihat bahwa pada periode Januari sampai dengan juni 2024 tidak ada aduan yang diterima.



Grafik 3.6 Jumlah Pengaduan Melalui Twitter Dinas Kesehatan Periode Januari- Juni 2024

3.6 Pengaduan Melalui Email Dinkes Kota Bogor

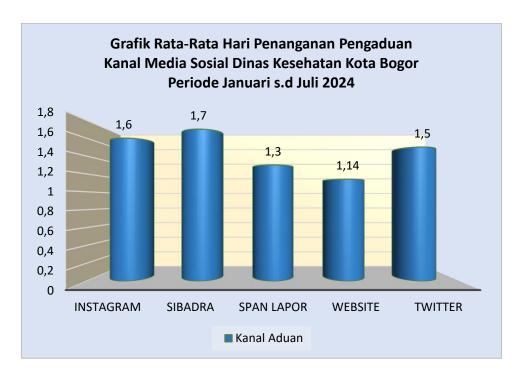
Total pengaduan melalui Email Dinas Kesehatan sebanyak 4 aduan, pada grafik dibawah ini menunjukan jumlah pengaduan tertinggi yaitu pengaduan untuk instansi lain sebanyak 2 aduan dan pelayanan kesling sebanyak 1 aduan. Setiap pengaduan yang masuk email Dinas Kesehatan , pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.



Grafik 3.7 Jumlah Pengaduan Melalui Email Dinas Kesehatan Periode Januari- Juni 2024

3.7 Penanganan Pengaduan

Tindaklanjut penanganan pegaduan yang masuk melalui website, email maupun media sosial lainnya, ditindaklanjuti paling lama 2 hari kerja dan direspon oleh admin dalam hal ini bagian humas Dinas Kesehatan, maksimal 24 jam dari pesan yang masuk. Kesulitan dari peanganan pengaduan ini adalah ketidakjelasan informasi pengaduan yang disampaikan, seperti penjelasan kondisi kejadian, waktu kejadian, tugas yang melayani dan tidak ada tanggapan selanjutnya dari pelapor mengenai pengaduan untuk ditindaklanjuti kembali, sehingga sangat sulit bagi Dinas Kesehatan untuk menyelesaikan. Rata-rata penanganan pengaduan dapat dilihat pada grafik dibawah ini .

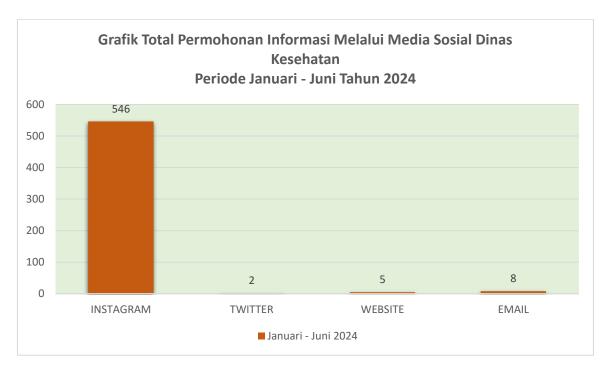


Grafik 3.8 Rata-rata Hari Penanganan Pengaduan Kanal Media Sosial

Dinas Kesehatan Periode Januari- Juni 2024

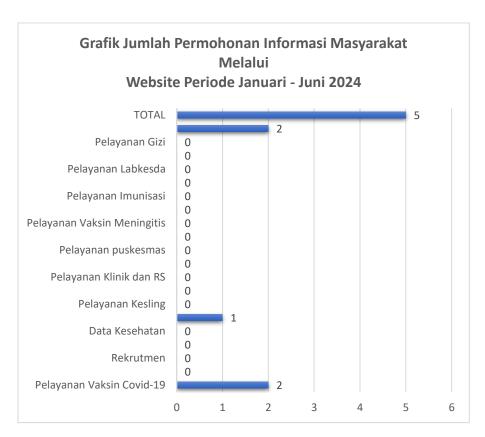
BAB 4 Permohonan Informasi

Dinas Kesehatan Kota Bogor selalu melakukan peningkatan pengelolaan pelayanan permohonan informasi, pada periode Januari – Juni Tahun 2024 permohonan informasi melalui media sosial terbanyak melalui Instagram yaitu 546 permohonan dan email yaitu 8 permohonan informasi. Semua permohonan informasi sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan.



Grafik 4.1 Permohonan Informasi Media Sosial Dinas Kesehatan Periode Januari- Juni 2024

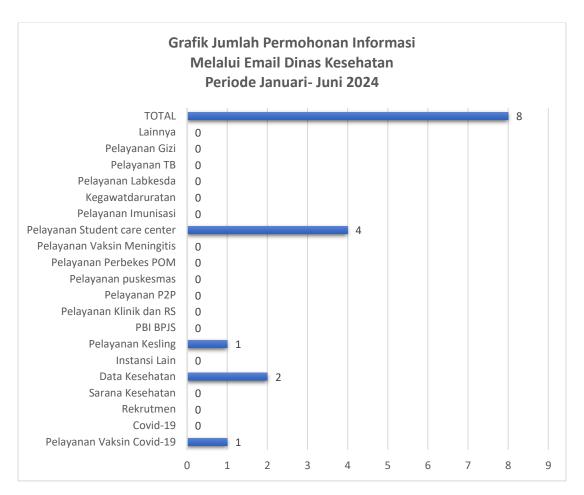
4.1. Permohonan Informasi Melalui Website Resmi



Grafik 4.2 Permohonan Informasi Media Website Dinas Kesehatan Periode Januari- Juni 2024

Topik tertinggi permohonan informasi adalah mengenai informasi pelayanan vaksin Covid-19 sebanyak 2 permohonan, informasi yang ditanyakan terkait jadwal vaksin, jenis vaksin dan lokasi vaksin, kedua permohonan informasi untuk topik lainnya sebanyak 2 permohonan, dan instani lain sebanyak 1 permohonan. Semua permohonan informasi yang masuk melalui website Dinkes sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

4.2. Permohonan Informasi Melalui Email Resmi

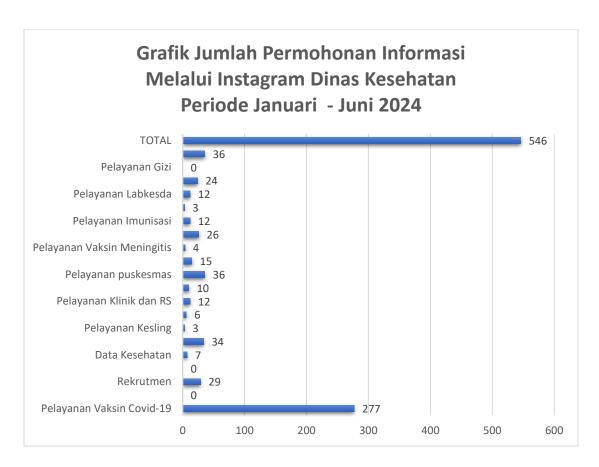


Grafik 4.3 Permohonan Informasi Media Email Dinas Kesehatan Periode Januari- Juni 2024

Permohonan informasi melalui email resmi, jika dilihat dari grafik diatas topik permohonan informasi cukup bervariatif dibandingkan melalui website atau media lainnya. Pada grafik diatas dapat dilihat topik pelayanan student care cente pada urutan pertama, urutan kedua tentang data kesehatan, urutan ketiga dan keempat mengenai pelayanan Kesling dan pelayanan Vaksin Covid-19.

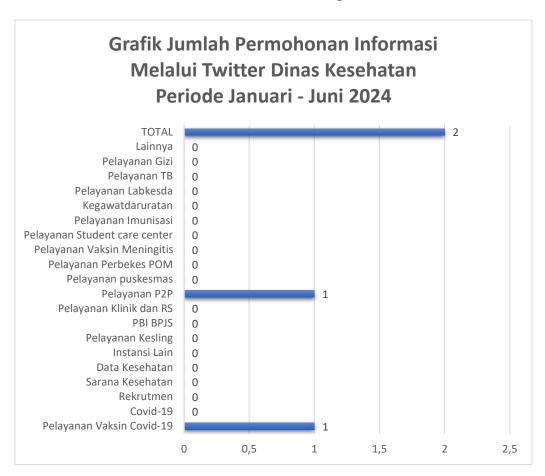
4.3. Permohonan Informasi Melalui Media Sosial Instagram

Permohonan informasi melalui Instagram, jika dilihat pada grafik diatas permohonan tertinggi mengenai pelayanan vaksin covid-19 sebanyak 277 permohonan, urutan kedua adalah mengenai pelayanan puskesmas dan lainnya serta yang ketiga mengenai pelayanan yang ditujukan kepada instansi lain. Permohonan informasi yang masuk sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan.



Grafik 4.4 Permohonan Informasi Media Instagram Dinas Kesehatan Periode Januari- Juni 2024

4.4 Permohonan Informasi Melalui Microblog Twitter

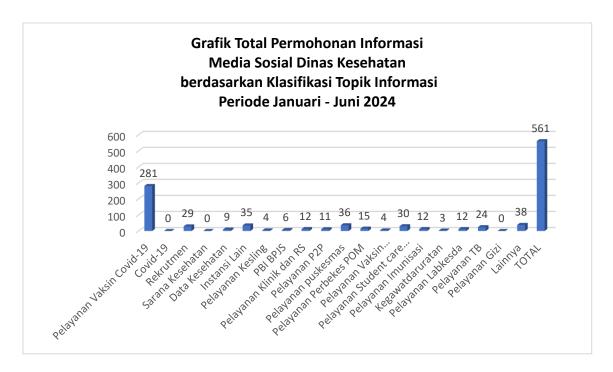


Grafik 4.5 Permohonan Informasi Media Twitter Dinas Kesehatan Periode Januari- Juni 2024

Permohonan informasi melalui microblog twitter, jika dilihat pada grafik diatas hanya ada dua permohonan yaitu mengenai pelayanan vaksin covid-19 sebanyak 1

permohonan dan pelayanan P2P. Permohonan informasi yang masuk sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Dapat dilihat pada grafik dibawah ini, permohonan informasi topik tertinggi dari semua media Dinas Kesehatan adalah mengenai pelayanan Vaksin Covid-19, kedua mengenai permohonan informasi di luar topik, ketiga pelayanan puskesmas dan keempat tentang instansi lain.



Grafik 4.6 Permohonan Informasi Media Sosial Dinas Kesehatan Berdasarkan Klasifikasi Topik Periode Januari- Juni 2024

Tindaklanjut penanganan permohonan informasi yang masuk melalui website, email maupun media sosial lainnya, ditindaklanjuti paling lama 2 hari kerja dan direspon oleh admin dalam hal ini bagian humas Dinas Kesehatan,maksimal 24 jam dari pesan yang masuk. Rata-rata waktu penanganan permohonan informasi dapat dilihat pada grafik dibawah ini



Grafik 4.7 Permohonan Informasi Media Sosial Dinas Kesehatan Berdasarkan Media Sosial Periode Januari- Juni 2024

4.5. Jenis Media yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor

| No | Jenis Media Komunikasi | Nama Akun | Keterangan |
|----|----------------------------|----------------------------|---|
| 1 | Microblog (Twitter) | @BogorDinkes | Aktif Sejak : Mei 2014Followers : 7.506 Akun |
| 2 | Media Sharing Instagram | @dinkeskotabogor | Aktif Sejak : Mei 2014Followers : 65.400 Akun |
| 3 | Youtube | Dinas Kesehatan Kota Bogor | Aktif Sejak : Oktober 2019Jumlah Video: 11 |

Tabel 4.8 Informasi Kanal Media Sosial Dinas Kesehatan 2024

Sarana komunikasi lain yang dimanfaatkan instansi terbanyak melalui kegiatan sosialisasi dan seminar. Di samping itu untuk menyampaikan informasi kegiatan, pengumuman dan imbauan dilakukan dengan menggunakan spanduk, leaflet, baliho, billboard, buletin atau videotron hingga stiker.

BAB 5 Penutup

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Dinas Kesehatan sudah cukup berjalan dengan baik. Masyarakat Kota Bogor dapat dengan mudah mendapatkan informasi maupun menyampaikan kritik dan saran secara langsung maupun tidak langsung. Respon permohonan informasi dan pengaduan ditanggapi oleh Dinas Kesehatan maksimal 24 jam dan ditindaklanjuti maksimal 2x24 Jam.

Topik tertinggi pengaduan pada tahun 2024 adalah mengenai pelayanan Klinik dan Rumah Sakit dan aduan Pelayanan Puskesmas. Media sosial yang paling banyak dipakai oleh masyarakat dalam menyampaikan pengaduan melalui media sosial adalah *Instagram.* Topik permintaan permohonan informasi yang tertinggi adalah mengenai pelayanan vaksin covid-19.

Ketua Tim PPID

dr. ERNA NURAENA

NIP. 197311112002122002